

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kecenderungan kecurangan akuntansi di Indonesia marak terjadi akhir-akhir ini, dimana hal tersebut menjadi pusat perhatian berbagai media di Indonesia maupun dunia. Kasus kecurangan yang sering terjadi baik di instansi pemerintah maupun instansi swasta adalah kasus korupsi. Di instansi pemerintah, kasus korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah. Korupsi merupakan jenis *fraud* yang sering dilakukan oleh seseorang dengan jabatan atau wewenang yang tinggi pada suatu instansi. Kecenderungan kecurangan akuntansi telah mendapat banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Tindak korupsi yang sering kali dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dan juga bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam entitas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik sehingga angka yang tercantum di laporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya. Selain sebagai alat komunikasi kepada publik, laporan keuangan juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik mengenai kinerja dari entitas publik. Pertanggungjawaban kepada publik harus dilakukan secara transparan. Jika dalam laporan keuangan mengandung *fraud*, maka pemerintah di nilai tidak memenuhi fungsi utamanya berkaitan dengan kepentingan publik.

Fenomena yang terjadi saat ini, berdasarkan sumber yang didapat dari Tribun Lampung, pada tanggal 13 Juli 2014 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung menemukan penyimpangan penggunaan anggaran perjalanan dinas (perjas) di 10 pemerintah daerah di Lampung. Dari 10 pemda, penyimpangan anggaran perjas terbesar terjadi di Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebesar Rp 1,35 miliar. Kepala Humas BPK Perwakilan Lampung Cosmas Andri mengatakan, temuan merupakan hasil pemeriksaan berdasarkan uji petik di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di masing-masing pemda di Lampung.

Kemudian pada tahun 2016 Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Pesawaran meminta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bumi Andan Jejama terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Pesawaran 2016. RPJMD akan dirumuskan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), seluruh SKPD yang ada di Pesawaran dibagi dalam empat bidang yaitu bidang pemerintahan, bidang solusi budaya, bidang infrastruktur dan bidang perekonomian.

Pada tahun 2017 Biro Organisasi Sekretariat Provinsi (Setprov) Lampung mendorong peningkatan pemahaman dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung maupun di 15 kabupaten/kota. Nilai LAKIP Lampung pada 2016 lalu masih berada di kisaran CC atau nilai standar. Ke depan kami mendorong SKPD di pemprov bersama pemda kabupaten/kota untuk bersama meningkatkan nilainya menjadi B. Skor nilai CC tersebut, kata Aris, menunjukkan pemda masih belum maksimal dalam melakukan pelaporan kinerja pemerintah yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 100-85. Sedangkan A (sangat baik) dengan skor 85-75, B (baik) dengan skor 65-75, CC (cukup baik) dengan skor 50-65, C (agak kurang) dengan skor 30-50, dan nilai

D (kurang) dengan skor 0 - 30. LAKIP adalah indikator dalam mempercepat reformasi birokrasi. Salah satu indikatornya adalah menyusun dan menjalankan program dengan memikirkan outcome, sehingga anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang dicapai. Pemahaman dalam penyusunan LAKIP, menjadikan SKPD menyusun program kerja dengan lebih baik, fokus dan terstruktur. penilaian LAKIP sudah dimulai sejak tahap perencanaan. Bapak/ibu dalam menyusun program harus cermat, menjalankannya dengan baik. Sehingga nilai LAKIP Lampung bisa membaik.

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau *fraud* merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. *Statement of Auditing Standart* dalam Norbarani (2012) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Salah saji material dalam laporan keuangan akan menyesatkan *stakeholder* atau pengguna laporan keuangan karena informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan lainnya juga dapat menilai tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya. Selain sebagai alat komunikasi kepada publik, laporan keuangan juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik mengenai kinerja dari entitas publik. Pertanggungjawaban kepada publik harus dilakukan secara transparan. Jika dalam laporan keuangan mengandung *fraud*, maka pemerintah di nilai tidak memenuhi fungsi utamanya berkaitan dengan kepentingan publik (Najahningrum, 2013).

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Akuntabilitas secara harafiah dapat diartikan sebagai “pertanggungjawaban” . Akuntabilitas berada pada ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, administrasi, politik, perilaku, dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungjawaban seseorang. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiensikan hasil dari proses organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik (Bastian, 2010: 88).

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan dari yang tidak memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis (Riantiarno dan Azlina, 2011). Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Hal ini berarti bahwa pemerintah tersebut mendapat kepercayaan masyarakat atas apa yang

diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan. Penurunan atau peningkatan akuntabilitas organisasi disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi di dalam suatu instansi (Thoyibatun, 2009). Kecurangan akuntansi merupakan kesengajaan untuk melakukan tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu sehingga terjadi kesalahan dalam laporan keuangan. Kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintahan menyebabkan data dan informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah sangat tidak objektif dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja atau bahkan dalam membuat keputusan. Hal tersebut akan menghambat tercapainya tujuan dari akuntansi pemerintahan, yaitu menjaga keuangan publik dengan mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi dan tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak beretika, memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintahan secara sehat, dan membantu pemerintahan dalam memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada penambahan variabel independen yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi. Alasan penambahan variabel tersebut karena menurut Najahningrum (2013) persepsi mengenai keadilan distributif, keadilan prosedural dan komitmen organisasi terdapat pengaruh untuk melakukan kecurangan yang nantinya akan juga berdampak pada organisasi instansi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi serta dampaknya terhadap Akuntabilitas Organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran”

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data primer. Kuesioner diberikan kepada bagian administrasi ketua dan staf keuangan atau akuntansi yang terpilih sebagai sampel pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesawaran.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran?
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran?
4. Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran?
5. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran?

6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran?

#### **1.4 Tujuan Masalah**

Tujuan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi di SKPD Kabupaten Pesawaran?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Bagi Penulis**

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, dan juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kecenderungan kecurangan akuntansi serta

dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi dan apa saja yang mempengaruhi dan berkaitan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi, dan juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi IBI Darmajaya.

### **1.5.2 Bagi Peneliti Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan, bahan referensi, dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis/peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dan hipotesa (bila diperlukan).



**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya fikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahas dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada BAB II. Penulis mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/alat/teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi rangkuman dari pembahasan yang terdiri dari jawaban atas perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis, hal baru yang ditemukan dan prospek temuan, pemaknaan teoritik dari hal baru yang ditemukan, dan saran yang merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis yang sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (obyek penelitian) dan penelitian selanjutnya sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**